

**KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM PEMBANGUNAN BANDARA
BARU DI KULON PROGO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IIM FATIMAH
13370044

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.
NIP.19790418 200912 2 001

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga menjadikan sektor transportasi sangat penting dalam upaya pembangunan wilayah di Indonesia, terutama transportasi udara yang akan menjadi penghubung antar daerah. Dampak dari upaya pengembangan suatu kota yang dilakukan berdasarkan pada peran dan fungsi kota melalui suatu kebijakan pembangunan kota pada aspek fisik dapat meliputi meningkatnya intensitas penggunaan lahan kota, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta meningkatnya kualitas lingkungan kota. Desa yang akan terkena dampak langsung dari relokasi bandara tersebut ada 4 (empat) desa yaitu Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, Keempat desa tersebut merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Temon yang wilayahnya dimanfaatkan untuk wilayah pertanian, perikanan, perkebunan, dan untuk pemukiman penduduk. Mayoritas masyarakat di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan Gubernur DIY, aparat desa, tokoh masyarakat dan warga di desa Glagah guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Selanjutnya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis dan normatif yang mana pendekatan yuridis terhadap kebijakan pemerintah dan pendekatan normatif terkait norma dan kaidah-kaidah agama serta keterkaitannya dengan teori fikih siyasah, data yang penulis peroleh dianalisis dengan teori kebijakan publik dan teori fikih siyasah yang terfokus pada Al-Maslahah Al-Mursalah dengan kaidah bahwa kemaslahatan itu harus kemaslahatan umat bukan untuk kemaslahatan kelompok atau golongan tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kebijakan Gubernur terkait pembangunan bandara dan dampaknya terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok fanatik terhadap pembangunan bandara dan kelompok liberal terhadap pembangunan bandara dan kelompok moderat terhadap pembangunan bandara. Selanjutnya adanya pembangunan tersebut berpotensi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di Kulon Progo dan dari pembangunan tersebut diantaranya terdapat peningkatan pendapatan daerah dan terbukanya lapangan pekerjaan, dampak negatif yang akan dirasakan yaitu akan banyaknya pengangguran dari sektor pertanian karena lahan pertanian yang ada disana sudah diratakan dengan tanah, dan kultur masyarakat setempat yang masih kental dengan pola masyarakat agraris akan sangat sulit bagi masyarakat agraris untuk berpindah pola ke industri ataupun ke pekerjaan lain.

Kata kunci: Fikih siyasah, Pembangunan bandara, Dampak Positif dan Negatif.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iim Fatimah
NIM : 13370044
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM
PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI KULON
PROGO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis dia dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Oktober 2017



Iim Fatimah
13370044



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iim Fatimah

NIM : 13370044

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat sesuatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,



Iim Fatimah
13370044



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Iim Fatimah

NIM : 13370044

Judul Skripsi : KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM
PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI
KULON PROGO PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum .

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Pembimbing,

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-536/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM PEMBANGUNAN
BANDARA BARU DI KULON PROGO PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IIM FATIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370044
Telah diujikan Pada : Kamis, 9 November 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP.19790418 200912 2 001

Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 9 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**BERTERIMAKASIH LAH PADA SEGALA YANG
MEMBERI KEHIDUPAN
(Pramoedya Ananta Toer)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ **Bapak Affandinur (alm) dan ibu faizah tercinta yang selalu menyayangi , mendoakan dan tak pernah bosan memberi nasehat dan dukungan. Serta kerja keras untuk kesuksesan anak-anaknya.**
- ❖ **H. Jahuri (alm) dan hj. Rukamah yang telah merawat dan menyayangi selama ini terima kasih atas doa dan kasih sayangnya.**
- ❖ **Pak de fauzi, pak de fauzan, pak de faizin, om farhan, pak de fatkur, mbak fatiyah yang telah memberikan semangat selama ini.**
- ❖ **Mbak fitri dan ka as'ad serta, mbak nunik tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta doa terbaiknya untukku.**
- ❖ **Almamater UIN Sunan Kalijaga.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWA yang telah memberikan nikmat iman, islam serta kesehatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Seiring bergulirnya waktu akhirnya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari beberapa pihak yang sangat membantu terselesainya karya ilmiah ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudin, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrahman Sw., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negara Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muh. Tamtowi., M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negara Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini sudah memberikan arahan terkait bidang-bidang akademik.
6. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
7. Raden Sunarya, selaku TU Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh staff bagian akademik yang telah mengakomodir segala keperluan penulis dalam urusan akademik dari penulisan skripsi ini.
10. Seluruh masyarakat Kulon Progo yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam mendapatkan informasi dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar H. Jahuri dan Hj. Rukamah yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat terbaik serta doa dan dukungan. Dan terimakasih untuk segala kasih sayang yang selama ini telah kalian berikan dengan penuh ketulusan hati.
12. Makdum Ali Robbani yang telah menjadi teman, sahabat serta menjadi partner yang memberikan semangat, dukungan, membantu dalam pencarian data dan informasi dan terima kasih atas perhatiannya kepada penyusun.
13. Hakiki Ngadul Wahid Hasan, dan Rizal Hamdani yang telah membantu penyusun dalam pencarian informasi untuk memperlengkap skripsi ini.

14. PMII Ashram Bangsa sebagai Organisasi yang telah membimbing jiwa intelektual dll.
15. Korp Korek PMII Ashram Bangsa yang selalu menjadi sahabat terbaik di organisasi kampus Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Sahabat MANINGA dan kawan-kawan jurusan tercinta yang selalu ada di kala suka dan duka, teman-teman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu dan terimakasih atas pertemanan yang semoga tidak selesai sampai di jenjang S1 ini.
17. Sabahat Pondok Pesantren Al-Husna yang telah memberikan do'a selama ini.

Semoga semua bantuan, dorongan, do'a, saran, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 02 Oktober 2017

Penulis,

Im Fatimah
13370044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Ṣin	S	Es
ش	Ṣyin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karomah al-Auliya'
-------------------------	---------	--------------------

C. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh: جَلَسَ: ditulis *jalasa*

تَرَبَّ: ditulis *syariba*

بُنِيّ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : جاهليّة ditulis *jāhilyyah*

فروض ditulis *furūd*

تنسى ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis *ai*

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

Contoh : قَوْلَ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَة ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاء ditulis *as-samā’*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidin*

K. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK DAN FIQH SIYASAH	26
A. Pengertian Fikih Siyasa.....	26
B. Objek Kajian Fiqh Siyasa.....	31

1. Qiyas	36
2. Istihsan	38
3. Masalah Mursalah	39
4. Istishab	41
5. Urf	42
C. Pengertian Kebijakan Publik	42
1. Pemerintah	44
2. Bentuk kebijakan publik	45
3. Tahap-tahap kebijakan	47
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN KULONPROGO	57
A. Gambaran Umum Kabupaten Kulonprogo	57
1. Letak Geografis Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Kulonprogo	57
2. Visi dan Misi Kabupaten Kulonprogo	59
3. Kondisi Geografis Kabupaten Kulonprogo	59
4. Sejarah dan Perkembangan Pemkab Kulonpro	62
B. Profil Masyarakat Kulon Progo	63
1. Penduduk	63
2. Sosial	64
3. Kesehatan	65
C. Gambaran Umum Kecamatan Temon	68
D. Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Bandara di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo ...	70

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara	77
1. Kelompok Menerima Pembangunan Bandara	77
2. Kelompok Menolak Pembangunan Bandara	78
3. Kelompok Tengah Pembangunan Bandara	80
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM	
PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI KULONPROGO..	83
A. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pembangunan Bandara	
di Kulonprogo	83
B. Kebijakan Gubernur dan Tanggapan Masyarakat	
Terhadap Kebijakan Gubernur DIY dalam Pembangunan	
di Bandara Baru di Kulonprogo.....	87
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	101
DAFTARPUSTAKA	102
LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	
Pedoman Wawancara	
Transkrip Wawancara	
Dokumentasi Penelitian	
Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	
Surat Permohonan Izin Penelitian	
<i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu komponen dalam upaya pembangunan suatu wilayah. Transportasi menjadi sektor tersier, yaitu sektor yang menyediakan jasa pelayanan kepada sektor-sektor lain (pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya). Hal tersebut karena sektor-sektor lain membutuhkan jasa transportasi untuk mengangkut barang (bahan baku dan hasil produksi) dan manusia (petani, pedagang, karyawan, guru, murid, dokter, wisatawan, dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi terus menerus dilakukan untuk mencapai pembangunan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih baik.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga menjadikan sektor transportasi sangat penting dalam upaya pembangunan wilayah di Indonesia, terutama transportasi laut dan udara yang akan menjadi penghubung antar pulau dan daerah. Oleh karena itu pembangunan sarana dan prasarana transportasi perlu diperhatikan secara cermat oleh pemerintah, civitas akademika, maupun masyarakat secara luas. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi tidak dapat terlaksana apabila faktor-faktor pendukung baik secara fisik maupun sosial di suatu wilayah pembangunan belum memenuhi syarat. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya (Arief Budiman,

¹<https://www.google.co.id/search?q=latar+belakang+pembangunan+bandara&oq=latar+belakang+pembangunan+bandara&aqs>. Diakses Tanggal 10 November 2016, Pukul 10.00 WIB.

2000: 1). Tujuan pembangunan pada umumnya antara lain untuk mencapai kenaikan (pertumbuhan) pendapatan perkapita secara tepat, menyediakan kesempatan kerja yang cukup, mengusahakan pembagian pendapatan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan dalam tingkat pertumbuhan antara daerah, dan merubah struktur perekonomian menjadi lebih seimbang.²

Sebelum adanya proses pembangunan perlu adanya proses perencanaan supaya pembangunan dapat berlangsung sesuai harapan dan mendapat hasil yang memuaskan. Menurut Tjokroaminoto (Badrul Munir, 2002: 23), perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dalam untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti dalam perencanaan pembangunan bandara tersebut.³

Setiap pembangunan tentu menghasilkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Soemarwoto, 2001). Dampak dari upaya pengembangan suatu kota yang dilakukan berdasarkan pada peran dan fungsi kota melalui suatu kebijakan pembangunan kota pada aspek fisik dapat meliputi meningkatnya intensitas penggunaan lahan kota, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta menurunnya

²<https://www.google.co.id/search?q=latar+belakang+pembangunan+bandara&oq=latar+belakang+pembangunan+bandara&aqs=chrome..69i57j0i3.11644j0j4&client=mas-android-xiomi&sourceid=chrome-mobile=UTF-8>. Diakses Tanggal 11 November 2016, Pukul 08.00 WIB.

³ Dikutip dari skripsi Esti Wahyu Kinasih, “Sikap Masyarakat Desa Palihan Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo”, Sarjana Strata 1 Universitas Negeri Yogyakarta, (2014), hlm. 25.

kualits lingkungan kota (Bintarto dan Khoiruddin, 2000). Peningkatan intensitas penggunaan lahan kota bermuara kepada peningkatan arus pergerakan dari dan menuju guna lahan tersebut. Peningkatan arus pergerakan dari dan menuju guna lahan tersebut. Peningkatan pergerakan akan berdampak pada wilayah antara pusat kota dan guna lahan baru yang bersangkutan.⁴

Dampak yang terjadi meliputi aspek-aspek wilayah secara keseluruhan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dampak yang dialami tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dimana implikasinya terkait dengan kegiatan wilayah perkotaan secara keseluruhan. Sebagai contoh misalnya pembangunan bandar udara baru di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggantikan peran Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta. Pembangunan bandara udara baru tersebut menggeser keberadaan guna lahan eksisting berupa pantai yang bernama Pantai Congot, pengusuran pantai tersebut kemudian dipertanggungjawabkan.⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Secara umum, penduduk DIY terkonsentrasi di wilayah

⁴ Winantu Ginanjar Langgeng “Persepsi Penduduk Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten kulon progo”, skripsi sarjana starata satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, (2014), hlm. 12.

⁵ Dikutip dalam acara diskusi bersama Lembaga Bantuan Hukum yang bertemakan Rencana Pembangunan Bandara Baru yang bekerja sama dengan lembaga pers dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan, tanggal 20 November 2016.

Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Persebaran penduduk yang tidak merata di Yogyakarta ini perlu adanya pemerataan yang salah satu pendukung pemerataan pembangunan melalui sektor transportasi. Walaupun sarana dan prasarana transportasi udara saat ini perlu adanya pemerataan yang salah satu pendukung pemerataan pembangunan melalui sektor transportasi. Walaupun sarana dan prasarana transportasi darat sudah baik, namun untuk sarana dan prasarana transportasi udara saat ini sudah tidak memadai dan tidak sesuai standar kelayakan operasi dalam UU Penerbangan Tahun 2009.⁶ Menurut Jiri Petrak dan Karl Peter (*Yogyakarta Airport Development Study*, 2009: 17-18) beberapa kelemahan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta saat ini adalah (1) Pertumbuhan jumlah penumpang dari tahun ketahun yang terus meningkat sedangkan kapasitas bandara yang sudah melebihi batas normal dan apabila akan diadakan pengembangan bandara lokasinya yang sudah tidak memungkinkan karena berada di wilayah padat penduduk (2) Landas pacu saat ini hanya memiliki panjang 2.200 meter, sedangkan landas pacu paling tidak memiliki panjang 2.500 meter dan apabila akan diperpanjang terkendala pada perbukitan dan pegunungan kapur disebelah timur bandara serta banyaknya penduduk yang akan terkena dampaknya (3) tidak adanya *parallel taxiway* sehingga menyebabkan kepadatan antrian pesawat yang akan *take off* maupun akan *landing* (4) Apron yang ada saat ini tidak mampu menampung pesawat yang berukuran besar atau airbus untuk mengakomodasi

⁶ Dikutip dalam acara diskusi bersama Lembaga Bantuan Hukum yang bertemakan Rencana Pembangunan Bandara Baru yang bekerja sama dengan lembaga pers dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan, tanggal 20 November 2016.

jumlah penumpang yang sudah diproyeksikan (5) Bangunan terminal di bandara sudah tidak mampu kenaikan jumlah penumpang pada saat jam sibuk.⁷

Walaupun sejak tahun 2009 Bandara Adi Sucipto beroperasi sebagai bandara internasional, namun fungsi yang diharapkan yaitu sebagai gerbang wilayah Selatan Pulau Jawa kurang maksimal. Status Bandara Adi Sucipto sebagai *enclave civil* menyebabkan landas pacu yang dimanfaatkan untuk dua kepentingan, yakni penerbangan sipil dan latihan terbang militer.

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penumpang di Bandara Adisucipto Hingga Tahun 2035.⁸

Tahun	Pesawat		Penumpang	
	Jumlah	Pertumbuhan	Jumlah	Pertumbuhan
2006	29,771	-5.11%	2,530,571	0.82%
2007	33,136	11.30%	2,884,851	14.00%
2008	24,143	-27.14%	2,791,441	-0.97%
2009	40,826	69.10%	3,699,966	32.55%
2010	45,195	10.70%	4,162,461	12.50%
2011	49,940	10.50%	4,661,957	12.00%
2012	55,084	10.30%	5,198,082	11.50%
2013	60,648	10.10%	5,769,871	11.00%
2014	66,652	9.90%	6,375,707	10.50%

⁷ Petrak Jiri dkk, *Yogyakarta Airport Development Study*, hlm. 17-18.

⁸ Study kelayakan PT. Angkasa Pura 1.

2015	73,117	9.70%	7,013,278	10.00%
2016	80,063	9.50%	7,679,539	9.50%
2017	87,509	9.30%	8,370,698	9.00%
2018	95,472	9.10%	9,082,207	8.50%
2019	103,969	8.90%	9,808,783	8.00%
2020	113,014	8.70%	10,544,442	7.50%
2021	122,621	8.50%	11,282,553	7.00%
2022	132,798	8.30%	12,027,202	6.60%
2023	143,555	8.10%	12,772,888	6.20%
2024	154,896	7.90%	13,513,716	5.80%
2025	166,823	7.70%	14,243,456	5.40%
2026	179,334	7.50%	14,955,629	5.00%
2027	192,426	7.30%	15,643,588	4.60%
2028	206,088	7.10%	16,300,619	4.20%
2029	220,308	6.90%	16,920,042	3.80%
2030	235,069	6.70%	17,495,324	3.40%
2031	250,348	6.50%	18,020,184	3.00%
2032	266,120	6.30%	18,488,708	2.60%
2033	282,353	6.10%	18,895,460	2.20%
2034	299,012	5.90%	19,235,578	1.80%
2035	316,056	5.70%	19,504,876	1.40%

Kapasitas Bandara Adi Sucipto yang tahun 2013 ini digunakan oleh lebih dari 5 juta penumpang tersebut kondisinya sudah tidak mencukupi lagi. Menurut data statistik jumlah penumpang di Bandara Adi Sucipto terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Sementara untuk memperluas lahan di Bandara Adi Sucipto sudah tidak memungkinkan lagi. Karena keterbatasan dan sempitnya bandara tersebut, saat ini pula banyak maskapai penerbangan yang ingin menambah jumlah penerbangan dari dan menuju Jogja namun terpaksa ditolak. Ia menyampaikan bahwa dari posisi lalu lintas *take off* dan *landing* sekarang ini saja, banyak pesawat yang terpaksa harus berputar-putar sebelum landing selama 20-30 menit, karena menunggu antrian. Kondisi ini sangat merugikan penumpang dari segi waktu dan kenyamanan. Sedangkan bagi maskapai masih ditambah lagi dengan meningkatnya biaya bahan bakar.⁹

Dalam perkembangannya kota-kota di Indonesia mengalami perubahan aktivitas yang didalamnya termasuk perubahan pemanfaatan atau penggunaan lahan. Perubahan penggunaan menurut Tadaro dalam (Munir, 2002) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Setiap pembangunan tentu menghasilkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Soemarwoto, 2001). Dampak dari upaya pengembangan suatu kota yang

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Munarta Kepala Bidang Perhubungan Udara, Pos, dan Telekomunikasi Dishubkominfo Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 April 2017.

dilakukan berdasarkan pada peran dan fungsi kota melalui suatu kebijakan pembangunan kota pada aspek fisik dapat meliputi meningkatnya intensitas penggunaan lahan kota, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta menurunnya kualitas lingkungan kota (Bintarto dalam Khoiruddin, 2000). Peningkatan intensitas penggunaan lahan kota bermuara kepada peningkatan arus pergerakan dari dan menuju guna lahan tersebut. Peningkatan arus pergerakan dari dan menuju guna lahan tersebut. Peningkatan pergerakan akan berdampak pada wilayah antara pusat kota dan guna lahan baru yang bersangkutan.¹⁰

Pada masa globalisasi ini, dimana manusia dituntut untuk dapat berpindah tempat beberapa ml jauhnya dalam waktu yang cepat guna menyelesaikan berbagai aktivitasnya, memunculkan fenomena akan manusia dengan mobilitas tinggi. Mobilitas ke berbagai penjuru dunia yang tentunya kini kita tidak cukup lagi jika dilayani melalui moda transportasi darat maupun laut karena akan memakan waktu yang cukup lama. Mobilitas tinggi ini lebih dapat terlayani dengan mudah oleh moda transportasi udara, dengan cara bepergian terbang dengan melalui bandar udara atau bandara untuk bermobilitas dengan menggunakan pesawat terbang.¹¹

¹⁰ Ristiyani “Sikap Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara di Kulon Progo”’ skripsi sarjana sarjana satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, (2014), hlm. 15.

¹¹<https://djuni.wordpress.com/membangun-bandara-internasional-yogyakarta-dikulonprogo>, Diakses pada 15 November 2016, Pukul 12.37 WIB.

Dalam perkembangannya bandara kini hanya dinilai sebagai fasilitas bagi transportasi udara. Keberadaan suatu bandara yang melayani kebutuhan akan moda transportasi udara akan memberi efek lanjutan bandara sebagai penggerak dan penggiat perekonomian, sehingga bandara kini ditempatkan sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan suatu daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Dengan luas 3.185,80 km², jumlah penduduk provinsi D. I . yogyakarta tercatat 3.434.534 jiwa. Rencananya bandara Kulon Progo akan memiliki terminal seluas 106.500 meter persegi (m²) dengan kapasitas 10 juta penumpang pertahun. Adapun hanggar seluas 371.125 m² sanggup menampung 28 unit pesawat.¹²

Bertitik pada pembahasan yang terkait tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dan pandangan Fikih Siyasah terhadap Kebijakan Gubernur DIY dalam pembangunan bandara baru di Kulon progo, dan menganalisisnya. Dari uraian diatas menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul:

“KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI KULON PROGO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”

¹² Jurnal <http://ensiklo.com,bandara-kulon-progo-adalah-bandara-pertama-indonesia-yang-dibangun-menggunakan-dana-bon-pemerintah#kenapa-kulon-progo-dipilih-sebagai-lokasi-bandara>, Diakses Tanggal 20 November 2016, Pukul 10.00 WIB.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana dampak positif dan negatif kebijakan pembangunan bandara baru terhadap masyarakat di desa Glagah ?
2. Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap kebijakan Gubernur DIY dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sejalan dengan pokok masalah yang telah disebutkan, tujuan utama dalam penelitian ini adalah menjelaskan:

- a. Untuk menjelaskan dampak positif dan negatif kebijakan tersebut dalam masyarakat.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Fikih Siyasah terhadap Kebijakan Gubernur DIY tentang pembangunan bandara.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penyusun, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan terutama dalam hal kebijakan pembangunan.
- b. Bagi akademis, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi sumbangsih pemikiran yang kritis oleh civita akademika.

- c. Bagi masyarakat dan pemerintah, diharapkan menjadi pertimbangan dalam menetapkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat atau orang banyak.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian, yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.¹³

Pertama, skripsi karya Winantu Ginanjar Langgeng mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, dengan judul “Persepsi Penduduk Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo”. Dalam Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi penduduk merupakan ketakutan kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan lingkungan alam. Faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi. Karena akan kehilangan mata pencaharian dan sulit untuk beralih profesi. Faktor sosial karena akan kehilangan tempat tinggal dan keturunan akan kehilangan pekerjaan, dan faktor budaya karena akan kehilangan peninggalan nenek moyang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas

¹³ Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.183.

menenai rencana pembangunan bandara dikecamatan temon, dan lokasi penelitian yang sama-sama didaerah terkena dampak pembangunan bandara.¹⁴

Kedua, skripsi karya Ristiyani mahasiwa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014, dengan judul “Sikap Masyarakat Kecamatan Temon Terhadap Pembangunan Bandara di Kulon Progo”. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sikap afektif masyarakat dipengaruhi perbedaan penilaian dan pandangan terhadap pembangunan bandara cenderung bersikap diam, sedangkan masyarakat yang tidak setuju mengekspresikan perasaan dan pendapatnya melalui demonstrasi dan aksi penolakan. Alasan sikap setuju meliputi, pembangunan bandara berdampak pada kemakmuran masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, tidak merusak lingkungan, dan tidak menghilangkan lahan pertanian. Alasan sikap tidak setuju meliputi, penambangan pasir besi dapat merusak lingkungan, menghilangkan lahan pertanian, menghilangkan pekerjaan masyarakat, dan menimbulkan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁵

Ketiga, skripsi karya Nuria Mustaqimah dengan judul, “Persepsi Masyarakat Kulon Progo Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo Tahun 2012-2015 (Study Kasus di Kecamatan Temon)”. Dalam penelitian mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembangunan bandara berada dalam kategori 1,99%. Alasan

¹⁴ Winantu Ginanjar Langgeng “Persepsi Penduduk Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten kulon progo”, skripsi sarjana starata satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, (2014).

¹⁵ Ristiyani “Sikap Masyaraakat Terhadap Pembangunan Bandara di Kulon Progo”’ skripsi sarjana starata satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, (2014).

masyarakat yang setuju adalah berdampak pada perekonomian yang meningkat.¹⁶

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹⁷ Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat penelitian untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fikih Siyasah.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Fikih Siyasah

Secara terminologis menurut ualama-ulama syariat (hukum islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil¹⁸ (terinci, yakni dalil dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, alquran sunnah -). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari alquran dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan

¹⁶ Nuria Mustaqimah "Persepsi Masyarakat Kulon Progo Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kulonprogo tahun 2010-2011" skripsi sarjana strata satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2014).

¹⁷ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

¹⁸ Suyuthi Pulungan , *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, cet ke-4 (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1999) , hlm. 24.

ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.¹⁹

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Mujtahid* dan *Lisan al-arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.²⁰ *Siyasat* bisa juga berarti pemerintah dan politik, atau membuat kebijakan. Abdul wahhab khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi mengatakan, arti kata *siyasat* adalah mengatur.²¹ Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*.²² Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintah dan politik. Artinya mengatur, dan mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.

Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *Siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.²³ Sedangkan dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syari'at, Dar al-Anshar, Al-Qahirat*, 19977, hlm. 185.

²² Haris Sulaiman, *Al-Faruiqi, Al- Mu'jam al-Qanuni*, Maktabat Lubnan, Bairut, 1983, hlm. 185.

²³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, cet ke-4 (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1999) , hlm. 25.

mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqomah*.²⁴ Definisi lain yang dikemukakan oleh ibn al-qoyim yang nukilnya dari Ibnu Aqil bahwa *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.²⁵ Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kedalam kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadaratan. Disamping ada persamaan ada pula perbedaan dari isi definisi tersebut yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Fiqh Siyasah atau *Siyasah Syar'iyah* terbagi menjadi tiga bidang kajian yaitu, *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah*, *siyasah maliyyah*.²⁶

Siyasah Dusturiyah adalah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁷ *Fiqh Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks

²⁴*Ibid.*, hlm. 26.

²⁵*Ibid.*, hlm. 27.

²⁶*Ibid.*, hlm. 43.

²⁷*Ibid.*, hlm. 44

yaitu meliputi ; persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), kemudian persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.

Siyasah Dauliyah adalah Siyasah yang berhubungan pengaturan pergaulan antara negara-negara islam dan negara-negara bukan islam, tata cara pengaturan pergaulan warga Negara muslim dengan warga non muslim yang ada dinegara islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan Negara islam dengan Negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.²⁸

Siyasah Maliyah adalah sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal.²⁹

Siyasah Harbiyah adalah mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.³⁰

2. Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik dalam konteks Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dikaitkan wacana otonomi daerah yang kini telah dijalankan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberi kesejahteraan kepada sebagian besar rakyat, namun di balik harapan tersebut juga diliputi rasa kekhawatiran. Otonomi dicemaskan

²⁸*Ibid.*, hlm. 45

²⁹*Ibid.*, hlm. 46.

³⁰*Ibid.*, hlm. 47.

akan melahirkan raja-raja kecil atau elit ekonomi di daerah yang tidak memperdulikan kesejahteraan rakyat.³¹

Istilah kebijakan sebenarnya sudah sering terdengar, baik melalui kajian-kajian tertentu, diskusi organisasi ataupun berita dari media komunikasi. Namun masih banyak dari kalangan awam atau akademisi yang belum mengerti apa sebenarnya kebijakan itu. Apakah sebuah peraturan ataukah sebuah perilaku pemerintah dalam menyikapi suatu masalah. Agar bisa mengkaji suatu kebijakan maka terlebih dahulu mengetahui arti dari kebijakan tersebut.

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan publik digunakan dalam praktek sehari-hari yaitu digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, *standar*, proposal, dan *grand design*. Namun secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor baik dalam organisasi ataupun kegiatan lain.³²

Menurut E. Anderson istilah kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, industri, pertahanan, dan sebagainya. Ruang lingkup kebijakan publik sangatlah luas. Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat

³¹ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 2-3.

³² *Ibid.*, hlm. 16.

bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.³³

Menurut Riag Nugroho kebijakan adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Dan David Easton menambahkan bahwa kebijakan publik adalah akibat dari aktivitas pemerintah. Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari dana atau uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan yang ditetapkan secara formal.³⁴

Salah satu definisi kebijakan publik diutarakan oleh Robert Eyestone yaitu secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Namun oleh James Anderson pengertian tersebut dipersempit lagi menjadi sebuah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.³⁵

Setelah mengetahui definisi kebijakan maka menjadi lebih mudah lagi untuk mengkaji suatu kebijakan. Disamping itu suatu kebijakan perlu adanya analisa kebijakan dan bila perlu setelah menganalisis diberikan

³³ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hlm. 80.

³⁴ Riag Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013) , hlm.18.

³⁵ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: MedPress, 2007), hlm. 2-3.

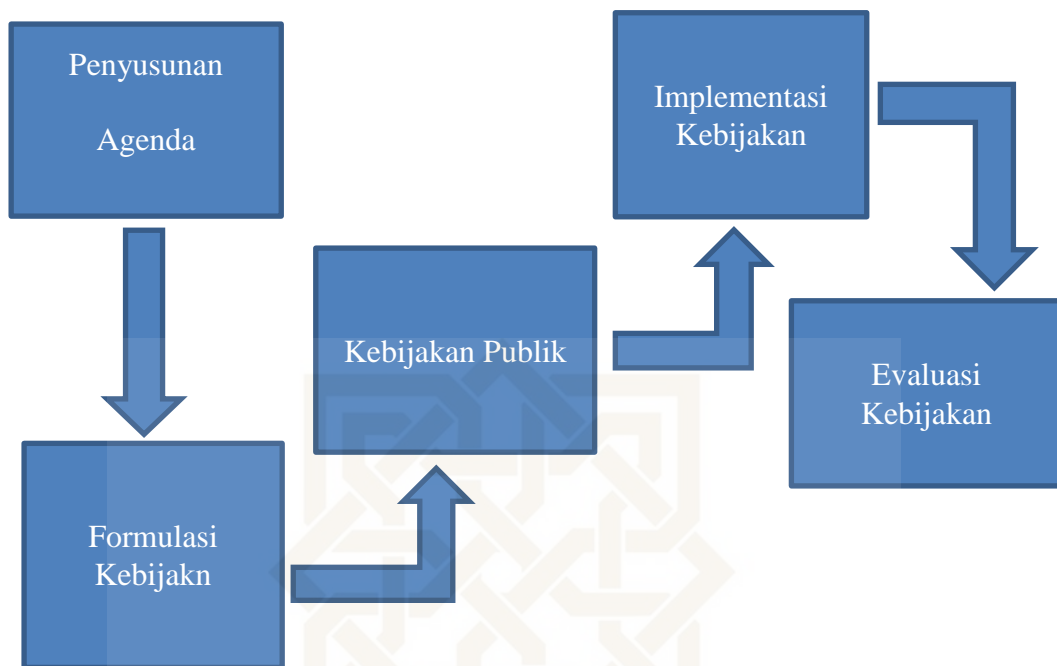
sebuah anjuran kebijakan.³⁶ Namun dalam penelitian yang akan penulis teliti hanya sebatas analisis kebijakan, apakah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kulonprogo merupakan kebijakan yang tepat jika dilihat dari implementasinya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan proses yaitu dengan perlunya mengetahui proses kebijakan tersebut dibuat tahap-tahap kebijakan tersebut dibuat. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahap-tahap yang akan dipaparkan bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, karena masih ada tahap lagi yaitu tahap perubahan kebijakan dan penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda,
- b. Formulasi kebijakan,
- c. Kebijakan publik,
- d. Implementasi kebijakan,
- e. Evaluasi kebijakan.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 30-32.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 32-34.



F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang mempunyai arti jalan cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu, maka metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmu untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta.³⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reasearch*) yang mana penulis terjun langsung pada peristiwa dimana diperoleh dan dikumpulkan dari subjek dan orang-orang yang bersangkutan atau informan untuk menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap.³⁹ Subjek penelitian dalam penelitian

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 16.

³⁹ Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999), hlm. 8.

ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat yang ada di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sifat deskriptif-analitis. Maksud dari Deskriptif-analitis adalah penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan kebijakan Gubernur DIY dalam Pembangunan Bandara Baru di Kulonprogo kemudian akan dianalisis dengan teori yang telah dipilih penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh merupakan data yang berwujud kalimat-kalimat verbal dan biasanya merupakan dokumen pribadi, catatan laporan, upaga atau cerita responden dan lain-lain yang sejebis dengan itu.⁴¹ Sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁰Sukadarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 20120, hlm. 104.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 136.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknis pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.⁴² Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa pihak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, Tokoh Masyarakat, dan Warga yang ada di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana pemerintah dalam menerapkan Kebijakan Gubernur DIY dalam Pembangunan Bandara Baru di Kulonprogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

sebagainya.⁴³ Namun yang dimaksud di sini adalah usaha pengumpulan dokumen- dokumen yang berangkutan dengan penelitian ini.

4. Sumber data

Sumber data ini terdiri atas dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang didapat oleh peneliti dengan cara langsung cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung.⁴⁴ Cara yang bisa digunakan penelitian untuk mencari data primer yaitu diskusi terfokus, wawancara langsung dengan Gubernur DIY yang mengetahui terkait Kebijakan Pembangunan Bandara Baru di Kulonprogo dan Kepala desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, Tokoh Masyarakat, dan beberapa Masyarakat yang ada di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 34.

⁴⁴ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenda Media Grup, 2007), hlm. 103.

b. Data Sekunder

Data yang dapat diperoleh oleh penelitian dari semua sumber yang sudah ada atau pernah ditulis oleh orang lain. Misalnya jurnal, buku, laporan, website dan lain sebagainya. Dengan sumber data sekunder adalah data-data lain, yang terdapat dalam buku-buku atau dokumen lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan Kebijakan Gubernur DIY dalam Pembangunan Bandara Baru di Kulon Progo itu sendiri.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam bab kedua akan membahas lebih lanjut tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisa yaitu dengan menggunakan teori Fikih Siyasah dan Kebijakan Publik.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah Kulon Progo, profil masyarakat Kulon Progo, gambaran umum Kecamatan Temon, dampak positif dan negatif pembangunan bandara di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, pandangan masyarakat terhadap pembangunan bandara baru di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis akan hasil temuan dengan berpijak pada bab-bab yang sebelumnya untuk menjawab dan menjelaskan apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap pembangunan tentu menghasilkan dampak. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dari upaya pengembangan suatu kota yang dilakukan berdasarkan pada peran dan fungsi kota melalui suatu kebijakan pembangunan kota pada aspek fisik dapat meliputi meningkatnya intensitas penggunaan lahan kota, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta menurunnya kualitas lingkungan kota. Peningkatan intensitas penggunaan lahan kota bermuara kepada peningkatan arus pergerakan dari dan menuju guna lahan tersebut. Peningkatan pergerakan akan berdampak pada wilayah antara pusat kota dan guna lahan baru yang bersangkutan.

Dampak yang terjadi meliputi aspek-aspek wilayah secara keseluruhan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Dampak yang dialami tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dimana implikasinya terkait dengan kegiatan wilayah perkotaan secara keseluruhan. Sebagai contoh misalnya pembangunan bandar udara baru di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggantikan peran Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta. Pembangunan bandara udara baru tersebut menggeser keberadaan guna lahan pertanian dan eksisting berupa

pantai yang bernama Pantai Congot, penggusuran pantai tersebut kemudian dipertanggungjawabkan.

Pembangunan bandara di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagai alat untuk mendorong pembangunan disebutkan bahwa harus adanya kemaslahatan umat dari pada kemaslahatan kelompok atau golongan tertentu. Dan jika dilihat dari segi kemanfaatan banyak yang akan didapat dari pembangunan bandara yang ada di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo salah satunya adalah terkait akan dibukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kulon Progo, dan meningkatnya perekonomian masyarakat dan meningkatnya status sosial. Perencanaan pembangunan bandara baru ini akan menggunakan tanah administratif Desa Jangkar, Sindutan, Paliha, dan Glagah. Tanah di ke empat desa tersebut terdiri dari tanah Pakualaman (Kawasan Sand Dunes) dan tanah hak milik masyarakat (kawasan pemukiman dan pertanian). Karena rencana pembangunan ini menggunakan tanah hak milik masyarakat, maka perlu diadakannya pemindahan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Akan Tetapi selama proses perencanaan pembangunan pasti menemui pihak yang memiliki persepsi positif dan yang memiliki persepsi negatif terhadap rencana pembangunan. Penduduk merupakan faktor penting sebagai pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan sebab penduduk merupakan komponen yang akan menerima dampak langsung dari adanya pembangunan.

Penduduk yang terdampak memiliki harapan tersendiri dari adanya pembangunan bandara baru tersebut. Walaupun ada penduduk yang mendukung pembangunan bandara, namun fakta di lapangan mengindikasikan bahwa masih adanya penduduk yang tinggal di keempat desa ini memiliki persepsi negatif terhadap rencana pembangunan bandara. Padahal sebagai upaya untuk mewujudkan proses pembangunan yang sudah direncanakan perlu adanya dukungan dari penduduk yang menempati wilayah tersebut.

Salah satu desa yang menolak rencana pembangunan bandara yaitu Desa Glagah. Desa Glagah termasuk dalam wilayah yang paling tepat sebagai lokasi pembangunan bandara. Dengan adanya bandara yang baru di Kabupaten Kulon Progo yang nantinya diharapkan akan mampu menambah pendapatan daerah. Walaupun sudah jelas tujuan pembangunan bandara tersebut untuk memajukan Kabupaten Kulon Progo dan penduduk setempat, tetapi masih ada beberapa kelompok penduduk setempat yang memiliki persepsi negatif terhadap rencana pembangunan tersebut. Belum diketahui secara pasti mengapa penduduk setempat memiliki persepsi negatif terhadap rencana pembangunan bandara serta bagaimana persepsi penduduk setempat mengenai rencana pembangunan bandara tersebut. Namun di lapangan ditemukan spanduk- spanduk yang bertuliskan “*sedumuk bathuk sanyari bumi*”. Bisa juga ungkapan *sedumuk* *batuk sanyari bumi* dalam konteks penolakan pemindahan penduduk, yang dapat diartikan sejengkal

tanah yang dimiliki akan dipertahankan selamanya yang mendasari penduduk setempat memiliki persepsi negatif rencana pembangunan bandara tersebut, padahal pembangunan bandara kalau dikaitkan dengan pandangan fikih siyasah yang menfokuskan pada al-maslahah sangat mendatangkan manfaat untuk semua masyarakat.

Kebijakan Gubernur terkait pembangunan bandara adalah suatu kebijakan yang digunakan oleh Gubernur sebagai alat untuk mendorong agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan Gubernur DIY. Secara umum penulis melihat dampak positif dari pembangunan bandara tersebut. Hal ini dapat di lihat dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan oleh masyarakat yang ada di desa Glagah kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Dalam kebijakan Gubernur terkait pembangunan bandara sudah sesuai karena sudah sesuai dengan lahan yang strategis meskipun dalam kenyataan disana rawan terhadap bencana dan sunami. Hal ini juga sesuai dengan tujuan daripada kebijakan pembangunan itu sendiri yang mana Gubernur DIY membuat kebijakan pembangunan bandara untuk stabilitas atau dinamisasi daerah di Kulon Progo. Stabilitas yang dimaksud adalah stabilitas dalam bidang pembangunan yakni pemerintah provinsi membuat kebijakan pembangunan bandara agar bisa mempunyai bandara yang bertaraf Internasional. Sehingga masyarakat khususnya di desa Glagah bisa memanfaatkan adanya pembangunan bandara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kulon Progo dan Pemerintah pusat agar dalam pembangunan bandara dan dampak pembangunan bandara lebih mempunyai dampak yang positif lagi, diantaranya:

1. Bagi pemangku kepentingan seharusnya lebih menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang terdampak terhadap pembangunan bandara.
2. Bagi masyarakat harus lebih bersabar apabila aspirasi-aspirasinya belum tersalurkan.
3. Lebih mendekat kepada pemerintah supaya aspirasi-aspirasinya bisa terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung PT Sygma Examedia Arkanleema.

B. Fiqh

Djazuli, fiqh Siyasah, *implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasat al-Syari'at, Dar al-Anshar, Al-Qahirat*, 19977.

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Sulaiman, Haris, *Al-Faruiqi, Al- Mu'jam Al-Qanuni*, Bairut: Maktabat Lubnan, 1983.

C. Buku-Buku

Azwar, Safiidn, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Pelajar. 1999.

BPS Kabupaten Kulon Progo, *statistik daerah kabupaten kulonprogo 2015*, Kulonprogo: PT. Pohan Cahaya Yogyakarta, 2015.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta; Rake Sirasih.1996.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Nawawi, Hidari, *Metode penelitian bidang sosial*, cet. Ke-13, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Nugroho, Riang, *Metode Penelitian Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Subarsono, AG, *Analisis kebijakan public*, Yogyakarta: Pustaka, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cet ke-19, Bandung: Alfabeta, 2014.

Waluyo, Bambang, *penelitian hukum dalam praktek*, cet. Ke-11 Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, cet. Ke-2 Yogyakarta: MedPress, 2007.

D. Karya Ilmiah

Esti Wahyu Kinasih, “Sikap Masyarakat Desa Palihan Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo”, skripsi sarjana strata satu Universitas Negeri Yogyakarta, (2014).

Nuria Mustaqimah, “Persepsi masyarakat kulon progo terhadap rencana pembangunan bandara internasional di kulon progo tahun 2010-2011” skripsi sarjana strata satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2014).

Winantu Ginanjar Langgeng, “Persepsi Penduduk Terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten kulon progo” skripsi sarjana strata satu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, (2014).

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2.

F. Lain- lain

Dikutip dalam acara diskusi bersama Lembaga Bantuan Hukum yang bertemakan Rencana Pembangunan Bandara Baru yang bekerja sama dengan lembaga pers dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Ahmad Dahlan, tanggal 04 November 2016.

<https://www.google.co.id/search?q=latar+belakang+pembangunan+bandara&oq=latar+belakang+pembangunan+bandara&aqs=chrome..69i57j0i3l1j644jaj4&client=mas-android-xiomi&sourceid=chrome-mobile=UTF-8>. Diakses Tanggal 10 November 2016, Pukul 10.00 WIB.

<https://www.google.co.id/search?q=latar+belakang+pembangunan+bandara&oq=latar+belakang+pembangunan+bandara&aqs=chrome..69i57j0i3l1j644jaj4&client=mas-android-xiomi&sourceid=chrome-mobile=UTF-8>. Diakses Tanggal 11 November 2016, Pukul 08.00 WIB.

Jurnal <http://ensiklo.com>, bandara-kulon-progo-adalah-bandarapertama-indonesia-yang-dibangun-menggunakan-dana-bon-pemerintah#kenapa-

kulon-progo-dipilih-sebagai-lokasi-bandara diakses pada 20 November 2016, jam 10.00.

www.Kulonprogokab.go.id/v21/kondisiumum.



Narasumber :

Pekerjaan :

Tempat :

Waktu :

1. Bagaimana menurut anda terkait dampak positif dari pembangunan bandara?
2. Bagaimana dampak negatif dari pembangunan bandara menurut anda?
3. Apa yang terkena dampak pembangunan bandara di wilayah Bapak?
4. Apakah bapak pernah ikut dalam sosialisasi rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo?
5. Berapa persen warga yang menolak pembangunan bandara disini?
6. Apakah bapak menolak terkena dampak pembangunan bandara?
7. Apa alasan bapak menolak rencana pembangunan bandara di wilayah bapak?
8. Dampak positif dan negatif apakah yang akan bapak terima jika pembangunan bandara di bangun?
9. Berapa besar ganti kerugian yang di dapat bapak?
10. Apakah bapak puas dengan besaran ganti rugi yang di dapat?
11. Apa harapan bapak sebagai warga terdampak?

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Desa :

Menerangkan bahwa:

Nama : Iim Fatimah

Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pengusunan skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI KULONPROGO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**”.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulonprogo, April 2017

(Narasumber)

Pedoman wawancara

Narasumber :

pekerjaan :

Tempat :

Waktu :

1. Apa yang terkena dampak pembangunan di wilayah anda?
2. Berapa tahun anda menggeluti pekerjaan tersebut?
3. Apa rencana anda setelah adanya pembebasan tanah?
4. Apakah anda menerima terkena dampak pembangunan bandara?
5. Ada berapa keluarga yang terka dampak pembangunan bandara?
6. Apa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan bandara yang anda rasakan?
7. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan gubernur terkait ijin penetapan lahan yang bertepatan di Kulonprogo?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman wawancara

Narasumber :

Pekerjaan :

Tempat :

Waktu :

1. Ada berapa kepala keluarga dan bidang yang terkena dampak pembangunan bandara?
2. Berapa persen petani di kelurahan Glagah?
3. Apa alasan mereka menolak pembangunan bandara?
4. Berapa besaran ganti kerugian yang di dapat warga?
5. Apa dampak positif dan negatif terhadap pembangunan bandara baru di Kulonprogo?

Terjemahan Ayat

BAB	HALAMAN	Fote note	TERJEMAHAN
2	26	49	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2	26	50	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dokumentasi

Bersama aparat desa



Foto bersama warga





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,

Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-077/Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

30 Maret 2017

Kepada
Yth. Ketua WTT
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

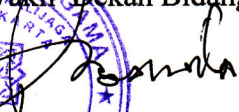
No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Iim Fatimah	13370044	Hukum Tata Neara Islam (Siyasah Syar'iyyah)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Temon Kabupaten KulonProgo untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**" KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM PEMBANGUNAN BANDARA BARU
DI KULONPROGO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 0





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840,
Fax.(0274)545614

<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-*877*/Un.02/DS.1/PN.00/ *3* /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

30 Maret 2017

Kepada
Yth. Gubernur Prov. DIY
Ub. Kepala BAKESBANGPOL
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Iim Fatimah	13370044	Hukum Tata Neara Islam (Siyasah Syar'iiyyah)

Untuk mengadakan penelitian di BAPPEDA KulonProgo untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**" KEBIJAKAN GUBERNUR DIY DALAM PEMBANGUNAN BANDARA BARU
DI KULONPROGO PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 0


CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

Nama : Iim Fatimah
Tempat dan Tanggal lahir : Jepara, 02 Maret 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 07 RW 07 Tengguli, Kec. Bangsri, kab.
Jepara
No. Hp : 081329327602
Email : Fatimahiim25@gmail.com



B. PENDIDIKAN FORMAL

1. MI Tamrinussibyan Tengguli 01 lulus 2007
2. MTS Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri lulus 2010
3. MA Nahdlatul Ulama Tengguli Bangsri lulus 2013
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk 2013

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren AL-Husna Bangsri

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ Hukum Tata Negara
2. PMII Rayon Ashram Bangsa

Yogyakarta, 11 September 2017

Iim Fatimah
13370044